

BAB-IV

UPAYA-UPAYA AIPA DALAM PENCAPAIAN ASEAN COMMUNITY 2015

AIPA merupakan sekumpulan parlemen-parlemen Asia Tenggara yang mempunyai visi dan misi khusus dalam mendorong terbentuknya ASEAN Community 2020 yang dipercepat menjadi 2015. AIPA dibentuk pada tahun 1977. AIPA sendiri merupakan parlemen yang berpengaruh dalam terciptanya ASEAN Community 2015.

Parlement ini memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan di kawasan ASEAN. AIPA dikenal sebagai parlemen yang memiliki power dalam membuat anggaran dalam membuat regulasi dan AIPA juga memiliki kekuasaan pengawasan untuk mendorong dalam harmonisasi sosial budaya. Hal ini akan mempermudah parlement ini mencapai tujuannya.

Dalam upaya mencapai ASEAN Community 2015 yang mencapai 3 pilar, AIPA berupaya memberikan dukungan seperti:

A. Mengharmonisasi Produk Legislasi Politik Dengan Cara AIPA Membuat Laporan, Program Dari Setiap Delegasi Mengenai Masalah-Masalah Dan Inisiatif Kebijakan Yang Diambil Terkait Dengan Masalah Tersebut:

Upaya parlemen ASEAN mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Peran AIPA dalam tingkat internasional, baik itu melalui organisasi regional, internasional maupun melalui aktor-aktor negara selama ini dalam upaya mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar, perlu dilengkapi atau didukung oleh jalur diplomasi lain yang juga dapat memainkan peran penting, yakni diplomasi parlemen.

Peran AIPA dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen merupakan unsur penting yang dapat berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional agar dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi umat manusia. Diplomasi parlemen dapat menjadi pendukung bagi diplomasi pemerintah. Diplomasi parlemen mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan sangat efektif dalam menyikapi dan merespons masalah-masalah regional maupun global.

Dalam konteks Myanmar, di sinilah sesungguhnya, AIPA menjadi penting untuk berperan dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar yang hingga kini masih menjadi isu internasional⁵⁶. Karena berbagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, antara lain terlihat dari sikap rezim militer Myanmar yang tidak terlalu responsif atas kritikan internasional, termasuk ASEAN, terutama terkait dengan status tahanan rumah Aung San Suu Kyi, tokoh pro-demokrasi dan pemimpin oposisi Myanmar⁵⁷.

Dengan mengembangkan hubungan kerja sama dengan parlemen atau anggota parlemen negara sahabat. Dalam kerangka diplomasi parlemen secara one to one ini, di antara anggota parlemen tersebut dapat membangun kesamaan pandangan dan sikap, misalnya mereka bersepakat untuk mendesak pemerintah

⁵⁶ Simela Victor Muhamad. 2010. *Harapan atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar* diunduh pada tanggal 20 desember 2014

⁵⁷ibid

dari negara-negara di suatu kawasan untuk lebih serius lagi dalam turut mengatasi suatu persoalan regional atau internasional yang dianggap dapat mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan itu. Seperti yang dilakukan Anggota Parlemen Indonesia, Suriah, dan Iran, di mana melalui misi diplomatik untuk melakukan dialog untuk menciptakan perdamaian⁵⁸.

Untuk mendukung pelaksanaan diplomasi parlemen secara one to one ini, DPR RI telah membentuk keanggotaan 59 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat⁵⁹. Dalam konteks hubungan kerja sama multilateral melalui organisasi atau asosiasi parlemen baik regional maupun internasional, diplomasi parlemen dapat dilakukan melalui sejumlah organisasi atau asosiasi antar-parlemen yang telah ada.

Inter-Parliamentary Union (IPU). IPU adalah organisasi internasional parlemen dari negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang didirikan pada tahun 1889⁶⁰. Organisasi ini, kini beranggotakan 155 parlemen, telah berkembang menjadi wadah yang diperhitungkan bagi dialog antar-parlemen, perdamaian, dan kerja sama antar-parlemen dalam rangka terbentuknya iklim demokrasi yang kuat dan representatif.

InterParlemen Union memperjuangkan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia anggota parlemen dalam rangka melindungi demokrasi perwakilan, agar anggota parlemen yang notabene wakil yang legitimate dari

⁵⁸ibid

⁵⁹ibid

⁶⁰Sekilas Ipu <http://www.ipu.org/english/whatipu.htm> Diakses Pada 24 Desember 2014

rakyat tersebut mendapatkan keamanan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terkait dengan situasi di Myanmar, IPU pun senantiasa aktif menaruh perhatian, antara lain dengan menjadikan isu demokratisasi di Myanmar sebagai salah satu agenda sidangnya, seperti yang terjadi pada Sidang Umum ke-117 IPU di Jenewa, Swiss, Oktober 2007. Pada Sidang Umum ke-117 IPU tersebut telah dihasilkan, antara lain, resolusi tentang "The urgent need to immediately stop the widespread human rights violations and to restore the democratic rights of the people of Myanmar".

Melalui resolusi tersebut Inter Parlemen mengecam keras cara-cara yang ditempuh oleh junta militer Myanmar dalam mengatasi aksi-aksi gerakan pro-demokrasi, dan menaruh keprihatinan yang mendalam dengan ditahannya sejumlah anggota parlemen Myanmar terpilih termasuk Aung San Suu Kyi dan juga tahanan politik lainnya serta para biksu dan para pemimpin kelompok etnik yang selama ini berjuang mempromosikan demokrasi, reformasi politik dan penghormatan terhadap HAM di negara Myanmar⁶¹.

⁶¹Simela Victor Muhamad. 2010. Harapan atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar diunduh pada tanggal 20 desember 2014

B. Mengharmonisasi produk ekonomi dengan cara AIPA membuat laporan, program dari setiap delegasi mengenai masalah-masalah dan inisiatif kebijakan yang diambil terkait dengan masalah tersebut:

1. Memajukan Dialog Sektor Swasta

Dengan memainkan peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang koheren.⁶² Melalui kerangka dukungan langkah-langkah yang efektif dengan tindakan-tindakan koordinasi yang konsisten dan struktur untuk pengembangan ekonomi. Dengan Menegaskan bahwa Kerangka kebijakan swasta perlu fokus mengidentifikasi kendala-kendala yang nyata dan menentukan Bagaimana cara mengatasi realistis dan dialog pribadi dan interaksi sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dan membina hubungan kebijakan

Dalam memerankan peran kunci Memerlukan berbagai sektor swasta dan lembaga kebijakan pembangunan infra struktur ,akses jasa dan hukum yang mendorong kebijakn yang koheren. Sektor swasta harus dibantu praktek yang baik dengan membantu rekomendasi dan monitoring ,evaluasi yang bertujuan memberikan bimbingan guna mengukur keberhasilan dan meningkatkan kinerja.

Dengan mengamati dialog sektor publik swasta yang mencerminkan global cenderung demokrasi dan sifat perubahan sebagian besar negara infestasi dalam pengembangan sektor swasta.

⁶²Majelis Asean Inter-Parliamentary 31st Majelis Umumha Noi, Viet Nam, Ulasan Tentang 19 - 25 September 2010 " [Http://Www.Aipasecretariat.Org/Wp-Content/Uploads/2010/04/Res_-Economic-Matters-Till31ga.Pdf](http://Www.Aipasecretariat.Org/Wp-Content/Uploads/2010/04/Res_-Economic-Matters-Till31ga.Pdf) Diakses Pada 24 Desember 2014

Peran AIPA menanggapi dialog tadi dengan memfasilitasi pertukaran pengalaman dalam perumusan dan pelaksanaan perusahaan termasuk usaha mikro kecil dan menengah dari anggota ASEAN.⁶³ Parlemen AIPA juga mendesak negara ASEAN untuk lebih fokus kedalam sektor publik swasta dengan penekanan pada pengembangan KPS melalui konsultasi dan menjamin transparansi dan konsolidasi. Selain itu Parlemen AIPA mendesak negara ASEAN untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dengan promosi yang diperlukan untuk memfasilitasi dialog swasta.⁶⁴

2. Pemecahan Integrasi otonomi daerah

ASEAN akan menjadi stabil makmur dan kompetitif dan pemerataan pembangunan mengurangi kesenjangan ekonomi 2015 dengan membentuk ASEAN Community 2015. Dalam upaya mencapai ASEAN Economic Community, ASEAN akan mengadopsi kerangka program ekonomi untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing ASEAN Global⁶⁵.

Parlemen AIPA akan memainkan peran kunci untuk mencapai tujuan ASEAN yaitu mencapai ASEAN Economic Community. Salah satu peran parlemen AIPA dengan menyediakan peta jalan untuk ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community merupakan program ASEAN yang

⁶³Ibid

⁶⁴Ibid

⁶⁵Majelis Asean Inter-Parliamentary 30th Majelis Umum 2-8 Agustus 2009, Pattaya City, Chonburi, Thailand http://www.Aipasecretariat.Org/Wp-Content/Uploads/2010/04/Res_Economic-Matters-TIII31ga.Pdf Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2014

terbuka berwawasan keluar industri dan ekonomi yang didorong pasar yang konsisten dengan aturan multilateral. Tujuan Parlemen membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi dengan pergerakan bebas barang, investasi, tenaga trampil, aliran modal yang sangat kompetitif. Parlemen AIPA juga memberikan harmonisasi Hukum untuk memfasilitasi integrasi dibawah ASEAN

Kebijakan yang dilakukan parlemen AIPA dengan

- a. meratifikasi perjanjian untuk menuju MEA /masyarakat ekonomi Asean
 - b. Mendukung tindakan AEC untuk memfasilitasi aliran barang bebas melalui ASEAN (perdagangan) bea cukai, penghapusan tarif dan non tariff hambatan standar tehnik perdagangan
 - c. Parlemen memberikan dukungan untuk memfasilitasi aliran barang dan jasa bebas tangan trampil dikawasan ASEAN
 - d. Memfasilitasi aliran bebas Intra ASEAN dan Asing melalui perlindungan, fasilitas, promosi dan liberalisasi perdagangan.
 - e. Memberikan kontribusi aliran modal melalui pasar modal ASEAN
 - f. Parlemen ASEAN bersaing sehat perlindungan HKI, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan UKM pembangunan.
3. Ketahanan Pangan dan energi

Ketahanan pangan sangat penting untuk kesejahteraan sangat penting untuk kesejahteraan. Makanan tidak hanya komoditas tetapi harus dapat diakses

secara kualitas dan kuantitas dengan harga wajar dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Pasokan pangan harus berkelanjutan perubahan iklim kekeringan, banjir adalah penyebab kekurangan pangan di ASEAN . Menuju AEC 2015 sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan ,dengan mengurangi gas emisi rumah kaca ,memberikan kontribusi besar gas emisi rumah kaca bagi perubahan iklim global,dan memberikan pasokan energi untuk mendukung dibidang industry

Dalam hal ini memicu parlemen-parlemen negara ASEAN termasuk AIPA untuk melakukan suatu upaya untuk menangani masalah pangan dan energi untuk menuju ASEAN Economic Community .

Upaya Legislasi yang dilakukan AIPA dengan :

- a. Mengharmonis peraturan tentang keamanan pangan nasional dengan agar dapat diterima secara internasional.

Dengan menyusun peraturan keamanan pangan sebagai berikut :

Dari Pihak produsen perlu untuk memastikan tentang kualitas dan keamanan dari hasil produksi mereka dan untuk menghindari berbagai potensi hazards seperti resiko dari pencemaran air atau dari mikroba atau kontaminasi kimia⁶⁶. Batas Maksimum Residu Pestisida Berbagai peraturan mengenai batas maksimum residu dari pestisida (herbisida, insektisida, fungisida dan lain-lain) berlaku efektif baik di tingkat nasional maupun internasional.Pihak produsen dan

⁶⁶ Buku Petunjuk Praktis Bagi Produsen Dan Ekportir Dari Asia"
www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html diakses pada tanggal 25 desember 2014

eksportir wajib mematuhi berbagai peraturan di negara masing-masing (terutama ketika mereka memiliki peraturan mengenai batas maksimum residu pestisida) dan berbagai peraturan yang ada di berbagai negara tujuan impor. Mereka hanya dapat menggunakan berbagai bahan kimia yang telah terdaftar untuk digunakan pada jenis tanaman tertentu dan harus mematuhi secara ketat berbagai petunjuk yang tertera di lembar petunjuk atau kontainer (kotak dan botol).

Melalui penelusuran produk (misalnya: penyakit sapi gila) dan terorisme global, banyak pemerintah yang meningkatkan pengawasan atas semua aspek produksi makanan, kegiatan pemrosesan dan distribusi guna melindungi konsumen dari makanan yang telah terkontaminasi secara kimiawi, biologis dan lingkungan. Penelusuran (penelusuran atas sebuah produk) adalah kemampuan untuk mengikuti pergerakan makanan di berbagai tingkatan yang spesifik dalam kegiatan produksi, pemrosesan dan distribusi.

Hal ini juga memberikan kemampuan untuk menarik kembali produk secara efisien jika terjadi kontaminasi produk. Selain itu, penelusuran membantu menentukan penyebab dari masalah keamanan pangan yang terjadi, mematuhi berbagai persyaratan hukum dan memenuhi harapan konsumen atas keamanan dan kualitas produk yang dibeli.

b. Mempromosikan produksi makanan yang aman dan sehat kepada produsen di semua tingkatan;

Jaringan supermarket di Eropa kian mensyaratkan bahwa para pemasok mereka telah mendapatkan sertifikasi mengenai keamanan pangan yang diberikan

oleh lembaga sertifikasi swasta seperti GLOBALGAP, BRC dan IFS. Berbagai jaringan ini memberikan kontribusi hingga lebih dari 60% dari penjualan retail produk segar di banyak negara Eropa⁶⁷. Selain itu, setiap perusahaan pengecer dapat menerapkan berbagai persyaratan kualitas yang lebih ketat terhadap para pemasok guna membedakan produk mereka dengan yang diujakan oleh para pesaing.

Demikian juga yang terjadi di pasar Asia, terdapat persyaratan keamanan pangan minimum yang harus disertifikasi yang disyaratkan oleh jaringan supermarket lokal atau usaha pemrosesan pertanian setempat. Kelompok pelanggan ini juga akan meminta adanya persyaratan kualitas tambahan agar mereka bersedia membeli produk produsen tersebut. Baik di wilayah Asia dan pasar internasional, para petani dan produsen bahan pangan akan semakin diminta untuk mendapatkan sertifikasi mengenai standar keamanan pangan.

c. Mengembangkan kerangka legislatif Model makanan dan pedoman dan memperkuat inspeksi makanan dan sistem sertifikasi dari peternakan ke di negara-negara anggota ASEAN

Dengan mengembangkan sertifikasi keamanan makanan dan praktek yang baik.

Jaringan supermarket di Eropa kian mensyaratkan bahwa para pemasok mereka telah mendapatkan sertifikasi mengenai keamanan pangan yang diberikan

⁶⁷ibid

oleh lembaga sertifikasi swasta seperti GLOBALGAP, BRC dan IFS⁶⁸. Berbagai jaringan ini memberikan kontribusi hingga lebih dari 60% dari penjualan retail produk segar di banyak negara Eropa⁶⁹. Selain itu, setiap perusahaan pengecer dapat menerapkan berbagai persyaratan kualitas yang lebih ketat terhadap para pemasok guna membedakan produk mereka dengan yang diujakan oleh para pesaing.

Demikian juga yang terjadi di pasar Asia, terdapat persyaratan keamanan pangan minimum yang harus disertifikasi yang disyaratkan oleh jaringan supermarket lokal atau usaha pemrosesan pertanian setempat. Kelompok pelanggan ini juga akan meminta adanya persyaratan kualitas tambahan agar mereka bersedia membeli produk produsen tersebut. Baik di wilayah Asia dan pasar internasional, para petani dan produsen bahan pangan akan semakin diminta untuk mendapatkan sertifikasi mengenai standar keamanan pangan.

4. Ancaman Peredaran gelap Narkoba dikawasan

Persoalan produksi dan peredaran gelap narkoba sejak lama menjadi masalah dikawasan asia tenggara. The Golden Triangel yang menghubungkan Thailand Utara, Myanmar Timur, dan Laos Barat, merupakan salah satu salah dua kawasan yang dikenal sebagai penanaman, produksi dan perdagangan opium dunia. Selama tahun 1970-an dan 1980-an kawasan ini dianggap sebagai penghasil opium terbesar, mencapai 700 metrik ton pertahun antara 1981-

⁶⁸ Buku Petunjuk Praktis Bagi Produsen Dan Ekportir Dari Asia"
www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html diakses pada tanggal 25
desember 2014

⁶⁹ibid

1987⁷⁰. Diperkirakan tahun 1980an 2/3 opium popies dunia (yang kemudian diolah menjadi heroin) ditanam dia Asia Tenggara dan dirilis pada tahun. Sejak perang afganistan pada oktober 2001 dan keseluruhan rezim Taliban ,Afganistan kembali menyerah pada produsen opium popies dunia.Laos merupakan produsen opium popies terbesar ketiga dunia setelah Afganistan dan Myanmar.

Pelaku Golden triangle melakukan diversifikasi untuk memenuhi peningkatan permintaan mereka pada syntetic drugs.Sejak awal 1990-an mereka meningkatkan keterlibatan dalam perdagangan heroin dengan membuat ATS .Myanmar kemudian membuat ATS terbesar di Asia dan masih menjadi penanam opium popis terbesar kedua dunia.Myanmar saat ini merupakan negara penghasil methamphetamine dikawasan, dimana pil-pil tersebut di edarkan ke negara-negara khususnya kawasan asia tenggara⁷¹. Untuk golden Heroin yang diproduksi Golden Triangle sebagai kawasan besar untuk ekspor keluar kawasan Asia Tenggara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi ancaman gelap narkoba dan sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keselamatan,dan kesejahteraan masyarakat Asia tenggara.

Tren peredaran gelap narkotikamenujukan bahwa terjadi peningkatan secara kualitatif maupun kuatitatif serta menimbulkan banyak korban terutama pada kalangan kaum muda. Kodisi memburuk juga dialami indonesia.Laporan PBB yang mengenai narkoba yang telah disampaikan pada tahun 2009

⁷⁰ Rizky Riza."Peran parlemen dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015" vol IV ,diakses pada 28 desember 2014

⁷¹ Rizky Riza."Peran parlemen dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015" vol IV ,diakses pada 28 desember 2014

menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi produsen sekaligus pengeksport narkoba. Kantor PBB urusan Obat terlarangan kejahatan UNODC mengingatkan agar semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan tentang bahaya narkoba.

ASEAN Drug Free 2015 telah menjadi perhatian pada tahun 1972. Perkembangan penting-penting dalam upaya ASEAN menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba adalah pembentukan ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD) yang mengadopsi ASEAN Regional Policy and Strategy in prevention and Control of Drug Abuse and illicit Trafficking adalah adopsi ASEAN plan of action Drug abuse Control pada bulan oktober 1994⁷². Hal itu menjadi bagian visi ASEAN 2020 yang dipercepat menjadi 2015.

Sebagai komitmen kawasan setiap kawasan negara anggota ASEAN berkontribusi dalam ASEAN drug 2015, dengan memberikan dukungan politik secara penuh bersama-sama menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba demi keamanan dan stabilitas kawasan. Pemerintah kawasan telah menggerakkan pemerintahannya dengan upaya mencapai sasaran tersebut.

Di sini peran parlemen ASEAN (AIPA) sangat memberikan peran yang cukup vital dalam upaya mewujudkan Drug Free ASEAN 2015. Hal itu dibahas dalam sidang AIFOCOM (The AIPA Fact Finding Committee) to combat Drug.

⁷² ASEAN Declaration of Principle to combat the abuse of Narcotic Drug
<http://www.aseansec.org//dlakses> 28 desember 2014

C. Mengharmonisasi produk legislasi sosial dengan cara AIPA membuat laporan, program dari setiap delegasi mengenai masalah-masalah dan inisiatif kebijakan yang diambil terkait dengan masalah tersebut :

1. Contoh Laporan Delegasi dari Indonesia

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana di antara negara-negara ASEAN seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Data menyebutkan Indonesia telah mengalami kerugian akibat bencana alam sekitar 10 tahun terakhir kerugian diderita Indonesia akibat bencana alam mencapai Rp 162 triliun. Jumlah tersebut sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan data yang dimiliki United National Development Project (UNDP) sebesar Rp 400 triliun.⁷³

Kebijakan yang diambil dari parlemen atau AIPA Indonesia sendiri :

Parlemen Indonesia menempatkan kebijakan untuk memastikan kesiapan bencana yang paling dikenal adalah Undang-undang no 24 tahun 2007. Undang-undang penanggulangan bencana alam disini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 UU no 24 tahun 2007⁷⁴. Undang-undang penanggulangan bencana yang radikal bergeser ke paradigma dari manajemen bencana respon orientasi pengurangan bencana. Hal ini Indonesia telah dihargai ditingkat global bahwa Indonesia merupakan negara juara dunia

⁷³Bappenas: Kerugian Bencana Di Indonesia Capai Rp 162 Triliun

[Http://Bisniskuangan.Kompas.Com/Read/2014/10/09/193100726/Bappenas.Kerugian.Bencana.Di.Indonesia.Capai.Rp.162.Triliun](http://Bisniskuangan.Kompas.Com/Read/2014/10/09/193100726/Bappenas.Kerugian.Bencana.Di.Indonesia.Capai.Rp.162.Triliun) Diakses Pada 24 Desember 2014

⁷⁴CaucusAipa
([Http://Www.Aipasecretariat.Org/Wpcontent/Uploads/2011/07/5.Third.Caucus.Report.Pdf](http://Www.Aipasecretariat.Org/Wpcontent/Uploads/2011/07/5.Third.Caucus.Report.Pdf), Diakses Pada 23 November 2014)

tentang pengurangan resiko bencana selama 3 th Global Platform tentang penanggulangan bencana alam di jenewa pada 10 mei 2011. Hal ini diikuti dengan pembentukan badan Nasional penanggulangan bencana /dikenal dengan BNPB melalui keputusan presiden no 21, 22, 23 tahun 2008. Yang masing-masing mempunyai fungsi :

Pasal 21 : Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas⁷⁵;

Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Dengan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana : dengan melakukan persiapan dengan langkah awal dalam mencegah terjadinya bencana dikawasan ASEAN seperti yang dilakukan oleh negara brunai darusalam, negara tersebut telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana dengan menerapkan sistem Insiden Comand System (ICS). ICS merupakan salah satu sistem yang digunakan brunai dalam tanggap bencana alam. Selain Brunai darusalam, indonesia juga memiliki cara dalam mengatasi bencana dengan menerapkan AADMER. Tidak hanya Indonesia dan brunai darusalam saja. Malaysia juga memiliki inisiatif dalam

⁷⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21

penanggulangan bencana seperti menetapkan National Security Council (NSC) merupakan dewan utama dalam pembuatan kebijakan dan koordinasi untuk penganggulangan bencana dimalaysia , tidak hanya NSC saja malaysia juga memiliki kebijakan penggulangan bencana lainya seperti melalui Disaster manajemen Risk Commitee DMRC,commitee tersebut memberi dukungan melalui adanya fungsi yang mengatur manjaemen bencana , berperan dalam tanggung jawab untuk instansi dan tindakan terkait lainya seperti menetapkan Undang-undang-undang Konservasi tanah,Undang-undang perlindungan hukum ,undang-undang perencanaan negara .

Menyusun prosedur dan Menetapkan penanganan bencana jika bencana tiba-tiba mendadak terjadi sepeti bekerja sama dengan badan- badan yang memiliki fungsi khusus dalam penanganan bencana dan menerapkan peringatan sejak awal untuk mengantisipasi adanya bencana didaerah.Terakhir yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya hal itu sebuah rancangan dalam pencegahan bencana didaerah.

Pasal 22 :

Dengan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, dengan melakukan persiapan jika terjadi bencana dengan menyusun kategori bencana alam,dengan mengklasifikasikan jenis bencana alam.Kemudian cara memantau ,sejauh mana perkembangan bencana membawa dampak buruk bagi masyarakat ASEAN .Setelah melakukan pemantauan langkah selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan

daerah, mengevaluasi penanggulangan daerah dilakukan dengan tujuan mengetahui berbagai masalah bencana di daerah untuk menetapkan kebijakan yang diambil dalam kasus penanggulangan bencana daerah.

Pasal 23 :Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah. Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi⁷⁶:

Dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat parlemen dan badan-badan khusus penanggulan bencana dengan menetapkan tugas-tugas dari pihak-pihak terkait tersebut. Setelah melakukan koordinasi, dengan mengkomando yang bertujuan untuk mengarahkan jika terjadi bencana setiap saat yang mendadak misalnya dengan menerapkan Insiden Command System . System ICS saat ini telah digunakan Brunai dalam melakukan comando dalam menanggapi bencana .Kemudian setelah dua pokok fungsi tersebut,yang terakhir yaitu pelaksana dalam penanggulan bencana pada wilayahnya ,maksudnya disini adalah realisasi dari program-program fungsi yang telah dibuat terkait dengan langkah-langkah penggulungan bencana daerah.

Pada tingkat oprasional BNPB telah menyiapkan 2 simulasi bencana. dengan menyiapkan response team sebagai mana tercantum dalam waktu 2 jam dalam menanggapi kasus bencana alam yang besar. Ada dua program yang dilakukan seperti simulasi abrasi pantai dan tsunami mitigasi yang dilaksanakan

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007
Pasal 23

oleh departemen kelautan dan perikanan. Inisiatif dilakukan dengan melalui penggabungan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana .

Pada tingkat lokal manajemen bencana dikelola oleh koordinator komisi Ad Hoc yang terdiri dari wakil-wakil dari kantor pemerintahan ,dari militer dan polisi juga terlibat dalam proses pencarian korban dan lokal penyelamatan yang dilakukan oleh SAR ⁷⁷. Sampai saat ini ada 27 dari 33 provinsi telah membentuk lokal bencana Manajemen (BPBD), dan 140 dari 275 kabupaten /kota daerah rawan bahaya telah menyiapkan BPBD⁷⁸ .

Indonesia juga meluncurkan platform Nasional untuk Pengurangan Resiko Rencana (PRB) pada tahun 2009 ,sebagai forum multi stake holder yang mempromosikan pengurangan resiko bencana dan memobilisasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan menerapkan langkah-langkah pengurangan resiko bencana alam berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo⁷⁹ .

Indonesia percaya bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sub regional dan koordinasi internasional dalam bidang manajemen bencana dan resiko pengurangan bencana, khususnya dengan dalam pengembangan mekanisme peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana . Pemerintah memberikan kontribusi dana bantuan bencana melalui Dana Tanggap Darurat (CERF) dan mengirimkan bantuan tim sukarelawan kepada negara yang terkena bencana alam seperti Haiti

⁷⁷ CaucusAipa(http://www.alpasecretariat.org/Wpcontent/uploads/2011/07/5.Third_Caucus_Report.Pdf, Diakses Pada 23 November 2014)

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

dan Jepang. Dalam hal upaya tanggap bencana Indonesia menjadi tuan rumah forum internasional SAR dan forum tanggap bencana pada bulan Juli 2011.

Ditingkat regional Indonesia mendukung Perjanjian ASEAN masalah manajemen tanggap bencana darurat (ADDMER) dan pembentukan Koordinasi Pusat Asia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan manajemen bencana (AHA Center)

Pasal 23 : Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah. Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi⁸⁰:

Dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat parlemen dan badan-badan khusus penanggulan bencana dengan menetapkan tugas-tugas dari pihak-pihak terkait tersebut. Setelah melakukan koordinasi, dengan mengkomando yang bertujuan untuk mengarahkan jika terjadi bencana setiap saat yang mendadak misalnya dengan menerapkan Insiden Command System . System ICS saat ini telah digunakan Brunai dalam melakukan comando dalam menanggapi bencana .Kemudian setelah dua pokok fungsi tersebut, yang terakhir yaitu pelaksana dalam penanggulan bencana pada wilayahnya ,maksudnya disini adalah realisasi dari program-program fungsi yang telah dibuat terkait dengan langkah-langkah penggulangan bencana daerah.

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 23

Pada tingkat oprasional BNPB telah menyiapkan 2 simulasi bencana dengan menyiapkan response team sebagai mana tercantum dalam waktu 2 jam dalam menangani kasus bencana alam yang besar. Ada dua program yang dilakukan seperti simulasi abrasi pantai dan tsunami mitigasi yang dilaksanakan oleh departemen kelautan dan perikanan. Inisiatif dilakukan dengan melalui pengabungan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana .

Pada tingkat lokal manajemen bencana dikelola oleh koordinator komisi Ad Hoc yang terdiri dari wakil-wakil dari kantor pemerintahan ,dari militer dan polisi juga terlibat dalam proses pencarian korban dan lokal penyelamatan yang dilakukan oleh SAR ⁸¹. Sampai saat ini ada 27 dari 33 provinsi telah membentuk lokal bencana Manajemen (BPBD), dan 140 dari 275 kabupaten /kota daerah rawan bahaya telah menyiapkan BPBD⁸².

Indonesia juga meluncurkan platform Nasional untuk Pengurangan Resiko Rencana (PRB) pada tahun 2009 ,sebagai forum multi stake holder yang mempromosikan pengurangan resiko bencana dan memobilisasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan menerapkan langkah-langkah pengurangan resiko bencana alam berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo⁸³.

Indonesia percaya bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sub regional dan koordinasi internasional dalam bidang manajemen bencana dan resiko pengurangan bencana, khususnya dengan dalam pengembangan mekanisme

⁸¹ Caucus Aipa (http://www.aipasecretariat.org/Wpcontent/uploads/2011/07/5.Third_Caucus_Report.Pdf, Diakses Pada 23 November 2014)

⁸² ibid

⁸³ ibid

peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah memberikan kontribusi dana bantuan bencana melalui Dana Tanggap Darurat (CERF) dan mengirimkan bantuan tim sukarelawan kepada negara yang terkena bencana alam seperti Haiti dan Jepang. Dalam hal upaya tanggap bencana Indonesia menjadi tuan rumah forum internasional SAR dan forum tanggap bencana pada bulan Juli 2011.

Ditingkat regional Indonesia mendukung Perjanjian ASEAN masalah manajemen tanggap bencana darurat (ADDMER) dan pembentukan Koordinasi Pusat Asia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan manajemen bencana (AHA Center)

2. Perubahan iklim, Manajemen bencana dan pencegahan penyakit pandemi

Dalam menanggapi masalah perubahan iklim, bencana, dan pencegahan penyakit pandemi banyak pihak lembaga yang terlibat salah satunya UNFCCC dan protokol Kyoto merupakan kerangka hukum yang khusus menangani perubahan iklim.⁸⁴

Para pemimpin delegasi menyetujui perubahan iklim akan dibahas sebab perubahan iklim akan dapat mempengaruhi negara-negara di ASEAN dan mempengaruhi tujuan pembangunan milenium /MDGs.

⁸⁴Majelis Asean Inter-Parliamentary 31st Majelis Umum Hanoi, Vietnam, Ulasan Tentang 19 - 25 September 2010 Pemecahan Pada Tanggal Perubahan Iklim, Bencana Manajemen Dan Pandemi Pencegahan http://www.aipasecretariat.org/WpContent/Uploads/2010/04/Res_Social-Matterstill31ga.Pdf Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2014

ASEAN juga menyadari bahwa akibat adanya perubahan iklim dapat mempengaruhi munculnya penyakit pandemi. Penyakit pandemi merupakan penyakit yang sangat serius yang akibat adanya perubahan iklim.

Upaya AIPA menanggapi masalah tersebut:

AIPA memberikan dukungan kontribusi secara aktif untuk Upaya regional dan global untuk mencapai kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum pada perubahan iklim dengan komitmen memberikan dukungan yang tepat dan bantuan untuk negara-negara berkembang untuk menanggapi perubahan iklim.⁸⁵

Parlemen AIPA dalam menanggapi perubahan iklim, manajemen bencana alam dan pencegahan pandemi, termasuk membuat Rencana Aksi ASEAN untuk Menanggapi Perubahan Iklim dan pelaksanaan Perubahan Iklim Initiative ASEAN (ACCI) mengkoordinasikan Pusat Bantuan Kemanusiaan tentang Pengelolaan Bencana dan Pusat Sumber Daya Komunikasi Risiko ASEAN.

3. Pemecahan masalah sumber daya Alam

Tercantum dalam Piagam ASEAN tujuan ASEAN khususnya untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan dan hidup belajar yang panjang, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan untuk penguatan Komunitas ASEAN. Sumber daya Alam penting untuk dikembangkan untuk menuju ASEAN Community yang kaya. Dalam hal ini AIPA ikut terlibat dalam mengembangkan sumber daya alam yang kaya sesuai komitmen ASCC blue print.

⁸⁵Ibid